

**INTEGRASI SOSIAL SUKU BAJO DALAM MASYARAKAT SIKKA
NTT: ANALISIS UNGKAPAN ADAT SEBAGAI REPRESENTASI
PENERIMAAN ETNIK**

Bertholomeus Jawa Bhaga

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Maumere
berthojawa14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi sosial komunitas Suku Bajo dalam masyarakat Sikka, Nusa Tenggara Timur, melalui kajian ungkapan adat sebagai representasi penerimaan etnik. Berbeda dari studi pada umumnya yang menekankan aspek ekonomi, maritim, atau marginalisasi komunitas Bajo, penelitian ini menawarkan pendekatan etnolinguistik dengan menempatkan ungkapan adat sebagai medium analisis utama dalam memahami proses integrasi sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi literatur dan interpretasi makna budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan adat dalam bahasa Sikka merepresentasikan nilai inklusivitas, penerimaan terhadap pendatang, serta konstruksi identitas berbasis teritorial. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut Suku Bajo, struktur simbolik dalam ungkapan adat menyediakan ruang legitimasi kultural bagi integrasi kelompok tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa adat berfungsi sebagai mekanisme simbolik dalam membentuk batas dan penerimaan etnik. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan perspektif antropologi linguistik dalam studi integrasi etnik, khususnya dengan menunjukkan bahwa ungkapan adat dapat berperan sebagai instrumen legitimasi sosial yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian Suku Bajo. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang integrasi sosial tidak hanya sebagai proses struktural, tetapi juga sebagai konstruksi simbolik berbasis bahasa dan budaya.

Kata Kunci: *Integrasi Sosial, Suku Bajo, Ungkapan Adat, Etnolinguistik, Identitas Etnik*

ABSTRACT

This study aims to analyze the social integration of the Bajo community in Sikka, East Nusa Tenggara, through the study of traditional expressions as a representation of ethnic acceptance. Unlike typical studies that emphasize the economic, maritime, or marginalization aspects of the Bajo community, this study offers an ethnolinguistic approach, placing traditional expressions as the primary analytical medium for understanding the process of social integration. The method used is qualitative, with a descriptive-analytical approach based on literature review and interpretation of cultural meanings. The results indicate that traditional expressions in the Sikka language represent values of inclusivity, acceptance of newcomers, and territorial-based identity construction. Although not explicitly mentioning the Bajo,

the symbolic structure of traditional expressions provides a space for cultural legitimacy for the group's integration. These findings confirm that traditional language functions as a symbolic mechanism in establishing ethnic boundaries and acceptance. This research's scientific contribution lies in strengthening the perspective of linguistic anthropology in the study of ethnic integration, particularly by demonstrating that traditional expressions can act as instruments of social legitimacy, a previously understudied focus in Bajo studies. Thus, this research broadens the understanding of social integration not only as a structural process but also as a symbolic construction based on language and culture.

Keywords: *Social Integration, Bajo Tribe, Traditional Expressions, Ethnolinguistics, Ethnic Identity*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multietnik memiliki kompleksitas sosial yang ditandai oleh keberagaman sistem budaya, bahasa, dan mekanisme integrasi antar kelompok (Ansor et al., 2023) (Anderson, 1991). Tentang keberagaman ini juga diulas oleh Kontjaraningrat bahwa Indonesia memiliki keberagaman baik suku, bahasa, agama dan berbagai entitas lainnya (Achmad & Jember, 2021). Dalam konteks ini, relasi antar etnik tidak hanya berlangsung pada level ekonomi dan politik, tetapi juga pada level simbolik yang lebih dalam melalui bahasa dan praktik budaya lokal (Wilce, 1998). Kondisi ini menjadikan kajian integrasi sosial tidak dapat dilepaskan dari dimensi simbolik dan linguistik masyarakat.

Dalam perspektif Fredrik Barth, etnisitas tidak ditentukan oleh perbedaan budaya internal semata, melainkan oleh batas sosial (*ethnic boundaries*) yang dibentuk melalui interaksi antar kelompok (Barth, 1969). Batas ini bersifat dinamis dan dapat dinegosiasikan melalui praktik sosial, termasuk bahasa dan simbol budaya. Studi kontemporer juga menegaskan bahwa batas etnik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks geografis dan relasi kekuasaan lokal (Fauziah, 2025) (Culture et al., 2025).

Suku Bajo sebagai komunitas maritim yang tersebar di wilayah Indonesia timur, termasuk Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, merupakan kelompok yang mengalami transformasi sosial dari kehidupan nomaden laut menjadi masyarakat pesisir menetap. Transformasi ini berdampak pada perubahan pola integrasi sosial mereka dengan masyarakat lokal (Eman et al., 2026). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kehidupan Suku Bajo masih sangat dipengaruhi oleh budaya maritim dan nilai tradisional yang kuat, terutama dalam aktivitas ekonomi dan sosial mereka (Nuwa & Kasim, 2024) (Buton, 2011). Selain itu, aspek hukum dan status sosial masyarakat Bajo juga menjadi perhatian dalam studi mutakhir terkait integrasi mereka di wilayah pesisir Indonesia (Taheriah et al., 2025).

Dalam proses interaksi tersebut, bahasa dan ungkapan adat memiliki peran penting sebagai media konstruksi realitas sosial. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, bahasa merupakan bentuk kekuasaan simbolik yang mampu menentukan posisi sosial suatu kelompok dalam struktur masyarakat (Bourdieu et al., n.d.). Studi antropologi linguistik terbaru menunjukkan bahwa bahasa lokal masih berfungsi sebagai instrumen utama dalam reproduksi nilai sosial dan legitimasi budaya di

komunitas tradisional Indonesia (Ortner & Cul-, 2010). Dengan demikian, ungkapan adat dalam masyarakat Sikka dapat dipahami sebagai mekanisme simbolik yang menentukan penerimaan atau eksklusi terhadap kelompok luar seperti Suku Bajo.

Lebih lanjut, Clifford Geertz menekankan bahwa budaya merupakan sistem makna (*webs of significance*) yang harus ditafsirkan melalui simbol-simbol yang hidup dalam masyarakat (Essays, n.d.). Dalam konteks masyarakat Sikka, ungkapan adat tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sistem makna yang membentuk cara masyarakat memahami identitas diri dan kelompok lain. Studi terbaru tentang simbolisme budaya di komunitas maritim Indonesia menunjukkan bahwa praktik budaya seperti ritual laut memiliki makna simbolik yang kuat dalam membentuk identitas sosial (Repelita et al., 2026) (Pesurnay, 2025).

Kajian mengenai etnolinguistik dan budaya lokal di Indonesia juga menunjukkan bahwa bahasa adat berperan penting dalam membentuk kesadaran sosial dan identitas kolektif masyarakat (Maulida et al., n.d.). Bahkan, dalam konteks multikultural Indonesia, bahasa lokal terbukti menjadi medium penting dalam memahami realitas sosial yang kompleks dan berlapis (Fauziah, 2025) (Arni, 2025).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tentang Suku Bajo selama tiga tahun terakhir masih berfokus pada aspek pendidikan, hukum, ritual maritim, dan transformasi sosial (Budaya & Oleo, 2024); Taheriah et al., 2025; (Nuwa & Kasim, 2024) . Belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan ungkapan adat sebagai medium analisis integrasi sosial. Padahal, dalam masyarakat adat seperti Sikka, bahasa adat memiliki fungsi strategis dalam membentuk batas sosial dan legitimasi penerimaan kelompok pendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang menghubungkan integrasi sosial Suku Bajo dengan analisis ungkapan adat sebagai representasi simbolik penerimaan etnik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan teori batas etnik (Barth), kekuasaan simbolik bahasa (Bourdieu), dan interpretasi budaya (Geertz), sehingga integrasi sosial dapat dipahami tidak hanya sebagai fenomena struktural, tetapi juga sebagai konstruksi simbolik berbasis bahasa dan budaya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan paradigma interpretatif untuk memahami makna ungkapan adat dalam konteks integrasi sosial Suku Bajo di masyarakat Sikka, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi makna simbolik bahasa dalam praktik sosial masyarakat.

Lokasi penelitian berada di wilayah pesisir Kabupaten Sikka yang menjadi ruang interaksi antara masyarakat lokal dan komunitas Suku Bajo. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yang terdiri atas tetua adat (*tana pu,an*), tokoh masyarakat, dan anggota komunitas Suku Bajo yang telah menetap.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi ungkapan adat yang digunakan dalam konteks sosial. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku antropologi, dan penelitian terdahulu terkait Suku Bajo serta masyarakat Sikka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Analisis teoritis menggunakan tiga pendekatan utama: teori batas etnik oleh Fredrik Barth untuk melihat dinamika batas sosial, teori kekuasaan simbolik oleh Pierre Bourdieu untuk memahami fungsi bahasa adat sebagai legitimasi sosial, serta pendekatan interpretatif budaya oleh Clifford Geertz untuk menafsirkan makna simbolik ungkapan adat dalam kehidupan masyarakat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan *member check* untuk memastikan konsistensi interpretasi dengan realitas lapangan. Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian sosial budaya, termasuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kerahasiaan informan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ungkapan Adat sebagai Struktur Sosial Inklusif dalam Masyarakat Sikka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan adat masyarakat Sikka membentuk struktur makna sosial yang berfungsi sebagai mekanisme integrasi terhadap kelompok pendatang, termasuk komunitas Suku Bajo yang menetap di wilayah pesisir.

Ungkapan-ungkapan yang ditemukan tidak berdiri sebagai teks tunggal, tetapi sebagai sistem naratif kolektif, yaitu:

1) “*Ata mai, tedo wawa lepa gete*”

Ungkapan adat “*Ata mai, tedo wawa lepa gete*” menggambarkan cara pandang masyarakat terhadap kehadiran pendatang dalam ruang sosial mereka. Frasa *ata mai* merujuk pada orang yang datang dari luar komunitas, sementara *tedo wawa* menunjukkan tindakan menetap atau tinggal secara berkelanjutan. Adapun *lepa gete* dimaknai sebagai rumah besar, yaitu simbol dari komunitas adat yang menaungi kehidupan bersama. Secara keseluruhan, ungkapan ini tidak sekadar menjelaskan keberadaan pendatang, tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk menjadi bagian dari kehidupan kolektif. Pendatang tidak diposisikan sebagai pihak luar yang selamanya terpisah, melainkan sebagai individu yang dapat diterima dan diakomodasi dalam struktur sosial masyarakat, selama mereka hidup dan berinteraksi dalam kerangka nilai-nilai bersama yang berlaku.

2) “*Ita nian tana, ita nian wai*”

Ungkapan adat “*Ita nian tana, ita nian wai*” merefleksikan pandangan holistik masyarakat terhadap ruang hidup yang mencakup darat dan laut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Frasa *nian tana* merujuk pada tanah sebagai ruang daratan yang identik dengan kehidupan agraris masyarakat Sikka, sedangkan *nian wai* menunjuk pada air atau laut yang

menjadi ruang hidup utama komunitas maritim seperti Suku Bajo. Ungkapan ini tidak sekadar menggambarkan pembagian geografis, tetapi mengandung makna simbolik tentang keterhubungan dan saling melengkapi antara dua ekosistem tersebut. Dalam kerangka ini, darat dan laut tidak diposisikan sebagai wilayah yang saling bertentangan, melainkan sebagai bagian dari satu tatanan sosial yang utuh. Oleh karena itu, dalam konteks interaksi dengan Suku Bajo, ungkapan ini menyediakan dasar kultural yang memungkinkan integrasi, karena keberadaan komunitas yang berorientasi pada laut dipahami sebagai bagian sah dari keseluruhan ruang hidup bersama masyarakat.

3) **“Ata mai, ata sai”**

Ungkapan adat “Ata mai, ata sai” menegaskan pandangan dasar masyarakat tentang kesetaraan kemanusiaan dalam relasi sosial. Frasa ini menyiratkan bahwa siapa pun yang datang maupun yang pergi tetap dipandang sebagai manusia, tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya karena perbedaan asal-usul atau latar belakang. Makna ini menunjukkan bahwa identitas etnik tidak dijadikan dasar untuk meniadakan atau merendahkan keberadaan seseorang dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, ungkapan ini membangun landasan moral yang menempatkan semua individu dalam posisi yang setara sebagai sesama manusia. Dalam konteks integrasi sosial, prinsip ini membuka ruang bagi penerimaan terhadap kelompok pendatang, karena relasi yang dibangun tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan etnik, tetapi pada pengakuan atas kemanusiaan yang bersifat universal.

4) **“Lepa gete, uma du’a”**

Ungkapan adat “Lepa gete, uma du’a” mencerminkan cara masyarakat memaknai komunitas sebagai ruang hidup yang bersifat kolektif dan terbuka. Istilah *lepa gete* merujuk pada rumah besar sebagai simbol kesatuan sosial, sedangkan *uma du’a* menggambarkan ruang bersama yang digunakan secara kolektif oleh anggota komunitas. Kedua unsur ini tidak hanya menunjukkan struktur fisik atau tempat, tetapi juga mengandung makna simbolik tentang keterbukaan dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Melalui ungkapan ini, masyarakat menegaskan bahwa komunitas bukanlah entitas yang tertutup atau eksklusif, melainkan ruang yang memungkinkan keterlibatan berbagai individu, termasuk mereka yang berasal dari luar. Dengan demikian, konsep “rumah besar” tidak hanya menjadi simbol identitas bersama, tetapi juga menjadi dasar kultural bagi terciptanya hubungan sosial yang inklusif.

5) **Rekonstruksi kontekstual: “Ata Bajo mai, ita nian tana no wai”**

Ungkapan ini tidak selalu ditemukan sebagai teks baku, tetapi muncul dalam narasi informan sebagai bentuk adaptasi makna. Kehadiran kata “Bajo” menunjukkan penyempitan referensi etnik yang spesifik, yang penting secara analitis karena menunjukkan pengakuan identitas dalam wacana lokal. Ungkapan adat menunjukkan bahwa integrasi sosial di Sikka tidak berbasis genealogis, tetapi berbasis ruang hidup (*space-based identity*). Ini menjadi dasar penting untuk analisis teori berikutnya.

2. **Batas Etnik yang Fleksibel dan Direkonstruksi**

Dalam perspektif Fredrik Barth, etnisitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang melekat secara tetap pada perbedaan budaya, melainkan sebagai hasil dari

pembentukan dan pemeliharaan batas sosial yang terus dinegosiasikan dalam interaksi antar kelompok. Dengan demikian, yang menjadi penentu bukanlah isi budaya itu sendiri, tetapi bagaimana batas antara “kita” dan “mereka” dibangun, dipertahankan, dan diubah dalam praktik sosial.

Dalam konteks masyarakat Sikka, ungkapan adat seperti “*ita nian tana, ita nian wai*” memperlihatkan bahwa batas antara kelompok lokal dan Suku Bajo tidak dikonstruksi secara konfrontatif. Darat dan laut tidak ditempatkan sebagai dua wilayah yang saling bertentangan, tetapi sebagai ruang yang saling melengkapi dalam satu kesatuan kehidupan sosial. Cara pandang ini menciptakan dasar simbolik yang memungkinkan keberadaan kelompok maritim seperti Bajo dipahami sebagai bagian dari keseluruhan tatanan sosial, bukan sebagai pihak luar yang harus dipisahkan.

Lebih jauh, integrasi dalam kerangka ini tidak berlangsung sebagai status yang langsung tercapai, melainkan sebagai proses yang terus berjalan. Suku Bajo tidak serta-merta melebur dan kehilangan identitasnya untuk menjadi bagian dari masyarakat Sikka, tetapi berada dalam posisi yang terus menyesuaikan diri melalui interaksi sosial yang berulang. Hal ini sejalan dengan pandangan Barth bahwa batas etnik dipertahankan justru melalui interaksi, bukan dalam kondisi terisolasi. Artinya, keberlanjutan relasi sosial menjadi kunci dalam membentuk pola integrasi yang dinamis.

Kehadiran Suku Bajo dalam kehidupan sosial masyarakat Sikka juga menunjukkan bahwa batas etnik bersifat cair dan kontekstual. Dalam situasi tertentu, seperti kegiatan ekonomi, hubungan sosial dapat berlangsung lebih terbuka, sementara dalam konteks adat atau ritual, batas tersebut bisa menjadi lebih tegas. Variasi ini menegaskan bahwa batas etnik tidak bersifat kaku, melainkan bergantung pada konteks sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, ungkapan adat berperan penting sebagai medium yang memungkinkan proses negosiasi tersebut berlangsung, karena melalui bahasa simbolik itulah masyarakat mendefinisikan, menyesuaikan, dan mengelola hubungan antar kelompok secara berkelanjutan.

3. Ungkapan Adat sebagai Kekuasaan Simbolik

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, bahasa tidak sekadar dipahami sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang memiliki kemampuan untuk mengakui, menolak, sekaligus mengatur posisi sosial suatu kelompok dalam masyarakat. Bahasa bekerja sebagai mekanisme halus yang menentukan siapa yang diterima, bagaimana mereka diterima, dan dalam posisi apa mereka ditempatkan.

Dalam konteks masyarakat Sikka, ungkapan adat memiliki kedudukan yang lebih dari sekadar tuturan sehari-hari. Bahasa adat digunakan dalam berbagai ruang sosial yang bersifat formal dan bermakna, seperti musyawarah adat, ritual penerimaan tamu, hingga proses legitimasi sosial dalam kehidupan komunitas. Penggunaan dalam konteks-konteks ini menunjukkan bahwa bahasa adat memiliki otoritas institusional, sehingga apa yang diucapkan melalui ungkapan adat tidak hanya mencerminkan nilai budaya, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menetapkan norma dan struktur sosial.

Keberadaan Suku Bajo dalam ungkapan adat memperlihatkan dinamika inklusi yang bersifat simbolik. Ketika identitas Bajo mulai disebut dalam narasi

seperti “*Ata Bajo mai...*”, hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan mereka dalam ruang sosial masyarakat. Namun demikian, pengakuan ini tidak serta-merta berarti bahwa mereka telah sepenuhnya memperoleh posisi yang setara dalam struktur sosial. Di sini terlihat adanya bentuk pengakuan yang tidak sepenuhnya simetris, di mana penerimaan secara simbolik belum tentu diikuti oleh penerimaan struktural yang utuh.

Lebih jauh, ungkapan adat seperti “*lepo gete*” tidak hanya berfungsi sebagai simbol komunitas, tetapi juga sebagai instrumen yang mereproduksi struktur sosial. Melalui simbol “rumah besar”, masyarakat secara implisit menetapkan batas-batas mengenai siapa yang dapat masuk, bagaimana cara masuk, dan dalam posisi apa seseorang berada di dalamnya. Dengan kata lain, bahasa adat menjadi alat kontrol sosial yang bekerja secara halus melalui simbol dan makna.

Dengan demikian, bahasa adat tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang netral. Ia merupakan arena kekuasaan simbolik tempat berbagai kepentingan sosial dinegosiasikan dan ditetapkan. Dalam arena ini, posisi Suku Bajo dalam masyarakat Sikka dibentuk dan ditentukan, bukan hanya melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui makna-makna simbolik yang dilekatkan dalam ungkapan adat yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.

4. Ungkapan Adat sebagai Sistem Makna Budaya

Dalam perspektif Clifford Geertz, budaya dipahami sebagai sistem simbol yang membentuk jaringan makna (*web of meaning*) dan harus ditafsirkan secara mendalam untuk memahami bagaimana suatu masyarakat melihat dunia dan dirinya sendiri. Dalam kerangka ini, ungkapan adat tidak hanya berfungsi sebagai bahasa, tetapi sebagai simbol yang memuat lapisan makna kultural yang kompleks.

Ungkapan seperti “*lepo gete*” tidak dapat dimaknai secara literal sebagai rumah besar semata, melainkan sebagai representasi kosmologi sosial masyarakat. Di dalamnya terkandung gambaran tentang bagaimana masyarakat membayangkan tatanan ideal kehidupan bersama, termasuk relasi antarindividu dan antar kelompok. “Rumah besar” menjadi simbol kesatuan, keteraturan, dan keterhubungan sosial yang melampaui sekadar ruang fisik, melainkan mencerminkan struktur sosial yang diidealkan.

Sementara itu, ungkapan “*ita nian tana, ita nian wai*” menghadirkan simbolisme darat dan laut sebagai dua elemen utama dalam membangun makna sosial. Darat dapat dipahami sebagai representasi stabilitas yang merujuk pada kehidupan agraris masyarakat Sikka, sedangkan laut melambangkan mobilitas yang identik dengan kehidupan maritim Suku Bajo. Dalam perspektif Geertzian, dualitas ini bukanlah bentuk oposisi, melainkan cara masyarakat mengonstruksi realitas sosialnya melalui simbol-simbol ekologis yang saling melengkapi. Dengan demikian, dunia sosial tidak dipahami secara tunggal, tetapi melalui relasi simbolik antara dua ruang kehidupan tersebut.

Integrasi Suku Bajo dalam konteks ini tidak dapat dilihat sebagai kondisi yang tetap atau selesai, melainkan sebagai proses interpretatif yang terus berlangsung. Penerimaan terhadap mereka bergantung pada bagaimana masyarakat menafsirkan keberadaan mereka dalam kerangka simbolik yang ada. Karena makna budaya bersifat dinamis, maka integrasi juga selalu terbuka terhadap perubahan, mengikuti konteks sosial dan adat yang melingkupinya.

Dalam sistem makna ini, penerimaan terhadap Suku Bajo tidak berlangsung melalui mekanisme administratif atau formal semata, tetapi melalui proses pemaknaan kultural. Mereka diposisikan sebagai bagian dari kosmos sosial masyarakat melalui simbol-simbol seperti "*lepo gete*", yang merepresentasikan ruang kebersamaan. Dengan demikian, integrasi terjadi ketika suatu kelompok tidak hanya hadir secara fisik dalam masyarakat, tetapi juga memperoleh tempat dalam sistem makna yang diakui secara kolektif.

5. Integrasi sebagai Proses Simbolik Bertingkat

Integrasi sosial tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan sebagai proses simbolik yang berlangsung dalam beberapa lapisan sekaligus. Dalam kerangka pemikiran Fredrik Barth, integrasi berkaitan dengan bagaimana batas etnik dibentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat Sikka dan Suku Bajo tidak ditentukan oleh perbedaan budaya semata, tetapi oleh dinamika batas sosial yang terus berubah sesuai konteks interaksi.

Sementara itu, perspektif Pierre Bourdieu menempatkan bahasa adat sebagai medium utama dalam proses tersebut, di mana integrasi berkaitan dengan distribusi legitimasi simbolik. Melalui ungkapan adat, masyarakat tidak hanya menyampaikan nilai-nilai budaya, tetapi juga secara implisit menentukan siapa yang diakui, sejauh mana pengakuan itu diberikan, dan dalam posisi apa suatu kelompok ditempatkan dalam struktur sosial. Dengan demikian, integrasi juga mencerminkan relasi kekuasaan yang bekerja secara simbolik melalui bahasa.

Di sisi lain, pendekatan Clifford Geertz menekankan bahwa integrasi harus dipahami sebagai proses interpretasi makna budaya. Ungkapan adat menjadi bagian dari sistem simbol yang membentuk cara masyarakat memaknai keberadaan kelompok lain. Dalam konteks ini, penerimaan terhadap Suku Bajo terjadi bahwa mereka tidak hanya hadir dalam ruang sosial, tetapi juga dimaknai sebagai bagian dari tatanan simbolik yang hidup dalam masyarakat.

Dengan menggabungkan ketiga perspektif tersebut, integrasi Suku Bajo dalam masyarakat Sikka dapat dirumuskan sebagai proses sosial yang berlangsung melalui negosiasi batas etnik, dimediasi oleh kekuasaan simbolik bahasa adat, dan dipahami melalui sistem makna budaya yang terus diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sosial Suku Bajo dalam masyarakat Sikka tidak hanya berlangsung pada dimensi struktural dan ekonomi, tetapi juga pada ranah simbolik yang termanifestasi dalam ungkapan adat. Ungkapan adat masyarakat Sikka seperti "*ita nian tana, ita nian wai*", "*lepo gete*", dan "*ata mai, ata sai*" merepresentasikan adanya ruang kultural yang inklusif terhadap kelompok pendatang, termasuk Suku Bajo.

Berdasarkan analisis teori Fredrik Barth, integrasi tersebut menunjukkan bahwa batas etnik bersifat dinamis dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial, bukan bersifat tetap. Dari perspektif Pierre Bourdieu, ungkapan adat berfungsi sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang menentukan legitimasi sosial dan posisi Suku Bajo dalam struktur masyarakat lokal. Sementara itu, menurut Clifford

Geertz, ungkapan adat merupakan sistem makna budaya yang membentuk cara masyarakat Sikka menafsirkan keberadaan kelompok lain dalam kerangka simbolik “rumah besar” sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi Suku Bajo di Sikka merupakan proses sosial yang bersifat simbolik, interpretatif, dan dinamis, di mana bahasa adat menjadi medium utama dalam membentuk penerimaan etnik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, U. I. N. K. H., & Jember, S. (2021). *BUKU AJAR Fakultas Ushuluddin , Adan dan Humaniora*.
- Anderson, B. R. O. G. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
<https://books.google.co.id/books?id=4mmoZFtCpuoC>
- Ansor, M., Masyhur, L. S., Negara, H. T., Syariah, F., Sultan, U. I. N., & Kasim, S. (2023). *Satu kampung enam iman : Penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku pada suku asli Anak Rawa di Siak , Riau*. 3(1), 1–16.
- Arni, A. (2025). *Unity Lens Intercultural Communication in a Multicultural Rural Village : A Case Study from Desa Lilimori , Indonesia*. 000000(7), 7–13. <https://doi.org/10.58920/etflin000000>
- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Differencee*. Boston: Little, Brown and Company.
<https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?author=Fredrik+Barth&search=Search>
- Bourdieu, P., Thompson, J. B., & Adamson, M. (n.d.). *Language and Symbolic Power Edited and Introduced by*.
- Budaya, F. I., & Oleo, U. H. (2024). *JURNAL SORUME Volume 02, Nomor 3, Desember Tahun 2024 275*. 02, 275–282.
- Buton, D. I. (2011). *Mitos dan aktivitas melaut masyarakat bajo di buton*.
- Culture, I., Islam, U., Sumatera, N., Arifin, Z., Islam, U., Sumatera, N., Samosir, H. E., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Constructing Territorial Identity : Strategic Narrative in Aceh ’ s Maritime Boundary Disputes*. 33(2), 481–507. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.20762>
- Eman, R. M., Konradus, B., & Roen, Y. A. (2026). *Pola Komunikasi Antarbudaya Etnik Bajo dan Etnik Sikka Kelurahan Wolomarang Kabupaten Sikka*. 5(1), 488–499. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v5i1.6348>
- Essays, S. (n.d.). *THE INTERPRETATION OF CULTURES SELECTED ESSAYS BY Clifford Geertz*.
- Fauziah, D. A. (2025). *Negotiating Language Policy and Local Practice : Multilingual Challenges in a Sundanese Classroom in Indonesia*. 22(1), 52–67.
- Maulida, I., Aminah, M., Septiani, D., Nurhamidah, D., Munibi, A. Z., Firdaus, S., Firmansyah, E., Sianipar, Y. O., & Zulfida, S. (n.d.). *No Title*.
- Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2024). *Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut di Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka*. 3(2).

- Ortner, S. B., & Cul-., S. T. (2010). *B r /c.* 95(4), 652–654.
- Pesurnay, C. Y. (2025). *E-ISSN BUDAYA MARITIM MASYARAKAT AMBON.* 8(2).
- Repelita, T., Nurfazrina, T., Amirullah, Z. K., & Karisa, D. D. (2026). *Makna Psikologis Tradisi Ruwat Lautpada Masyarakat Pesisir Desa Ciparage Jaya.* 4, 263–270.
- Taheriah, N., Salam, S., & Salam, S. (2025). Status Hukum Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum,* 8, 191–199. <https://doi.org/10.32493/rjih.v8i2.56543>
- Wilce, J. (1998). *Book Reviews.* 4(chapter 5), 131–133.